



DAK Rp 20,8 Miliar Terancam Hangus

AMLAPURA, NusaBali

Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 20,8 miliar untuk rehab SD dan SMP tahun 2015, di Karangasem terancam hangus. Sebab, di tahun 2014 terjadi gagal tender senilai Rp 5,8 miliar, menyusul tahun 2015 Rp 15 miliar, juga ada indikasi menemui kegagalan yang sama, total Rp 20,8 miliar. Sebab, untuk memanfaatkan dana Rp 20,8 miliar, mesti anggaran itu terlebih dahulu masuk di APBD Perubahan 2015. Setelah itu, barulah proses tender bisa berjalan.

Kabid Dikdas Disdikpora I Gusti Bagus Budiadnyana, memaparkan hal itu, di Amlapura, Jumat (8/5). "Memang kalau gagal memanfaatkan dana DAK itu, terancam dana itu hangus. Tetapi tetap berupaya agar DAK tahun 2015, bisa teralokasikan," kata Gusti Budiadnyana.

Sebab, kata Gusti Budiadnyana, tender bisa saja mendahului sebelum APBD Perubahan Oktober 2015, mengacu Permendagri No 37 tahun 2014 tentang tata cara penyusunan APBD 2015, khususnya tertuang di pasal 11.

"Tender bisa terlaksana, setelah mengajukan surat pemberitahuan ke DPRD, tidak mesti melalui pembahasan APBD Perubahan," tambahnya.

Gusti Budiadnyana menambahkan, DAK tahun 2015 sebesar Rp 15 miliar, masing-masing untuk rehab bangunan 79 SD sebesar Rp 11 miliar, dan untuk rehab 23 SMP sebesar Rp 4 miliar. Sedangkan dana DAK tahun 2014 yang gagal tender, senilai Rp 5,8 miliar masing-masing untuk SD Rp 3,5 miliar dan untuk SMP Rp 2,3 miliar. "Tahun ini optimis semua DAK teralokasikan, karena petunjuk teknis

pelaksanaannya telah turun baik untuk SD maupun SMP, tinggal menunggu prose tender, optimis tidak gagal lagi," jelasnya.

Sebab, risikonya jika gagal tender kedua kali, DAK hangus, dan DAU (dana alokasi umum) untuk Pemkab Karangasem dari pusat berkurang. Padahal, 79 SD dan 23 SMP yang masuk agenda perbaikan, telah terdata melalui survei. Misalnya SD Negeri 2 Subagan, Kecamatan Karangasem dan SD Negeri 3 Peringsari, Kecamatan Selat, yang telah roboh masuk daftar perbaikan sekala prioritas. Untuk SMP, misalnya yang mengalami rusak parah di SMPN 1 Abang.

Walau DAK teralokasikan, tetap saja pelaksanaannya di lapangan diperkirakan menemui banyak kendala lagi. Apalagi, dana perbaikan bangunan tersebut nantinya dikerjakan secara swakelola, melalui P2S (panitia pembangunan sekolah). Kendala lainnya, di seluruh SD penerima bantuan tanpa didukung tenaga tata usaha, dan pertanggungjawabannya ruwet. "Soal teknis, nanti setiap sekolah dapat pelatihan, tata cara pelaksanaan proyek dan teknis menyusun LPJ," tambahnya.

Wakil Ketua DPRD Ida Bagus Adnyana mendorong, agar perbaikan sarana dan prasarana sekolah secepatnya terealisasikan. Sehingga tidak ada lagi gedung yang roboh atau keropos, tanpa perbaikan. "Ini kan merupakan bagian dari upaya meningkatkan sumber daya manusia, melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah," jelasnya seraya menambahkan yang terpenting peruntukkan dana DAK itu jelas. **k16**

Edisi : Sabtu, 9 Mei 2015

Hal : 8



BPK Soroti 59

Galian C Bodong



Aktivitas di salah satu galian di Karangasem. Kini aktivitas galian C ilegal jadi sorotan BPK.

• NUSABALI/NANTRA

Edisi : Sabtu, 9 Mei 2015

Hal : 11



Setiap bulan pengusaha galian baik yang legal maupun ilegal itu melapor pajak yang telah mereka setorkan. BPK pun memperlakukan setoran dari galian C ilegal itu.

AMLAPURA, NusaBali

Hasil penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan petugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Karangasem menyoroti adanya 59 galian C yang ilegal alias bodong karena tak mengantongi izin yang dipersyaratkan. Sebab secara otomatis, sebagian pajak dipungut dengan sumber berasal dari galian ilegal. Atas dasar itulah Bupati Karangasem I Wayan Geredeg tengah merancang melakukan penutupan galian ilegal secara bertahap di mana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah siap melakukan penutupan.

Dari informasi yang dihimpun NusaBali di Amlapura, Jumat (8/5), hasil pantauan BPK selama tahun 2014, menemukan adanya 59 galian bodong, dan diminta agar penertibannya ditindaklanjuti. Apalagi galian tersebut kebanyakan bukan di daerah kawasan galian. Bupati

Geredeg mengakui, banyaknya galian bodong di lokasi yang bukan kawasan. "Makanya kita tengah merancang penutupan galian ilegal secara bertahap. Paling tidak yang sebelumnya mengantongi izin, setelah izinnya berakhir, tidak dapat izin perpanjangan," katanya. Selain menutup galian bodong, juga kata Geredeg tengah diperjuangkan alternatif lain, sebagai pengganti pajak galian C tersebut.

Di bagian lain Kepala Satpol PP Iwan Suparta mengakui, banyak galian bodong tersebar di beberapa kecamatan. Selama ini Tim Yustisi melakukan penutupan, di lokasi yang benar-benar membahayakan, seperti di hutan lindung dan mengancam pemukiman. "Sepanjang ada kajian teknis yang akurat, dan ada surat perintah penutupan, kami siap melakukan penutupan galian C," katanya.

Apalagi lanjut Iwan, galian C bodong telah jadi temuan petugas BPK. Menyangkut gebrakan lebih lanjut, mengatasi galian bodong, seluruh kajiannya telah di tangan Dispenda Karangasem. "Lebih lanjut tanyakan ke Dispenda," pintanya.

Di bagian lain, Kadispenda Karangasem I Nengah Toya mengatakan, setiap bulan pengusaha galian C baik yang legal maupun ilegal melapor, terkait pajak yang

telah mereka setorkan.

Namun Nengah Toya mengaku tidak mengurus galian C yang legal dan ilegal. "Kami bukan mengurus bidang perizinan. Kami hanya mengurus pajak galian C. Tiap bulan, pengusaha galian C berizin atau yang tanpa izin melaporkan pajaknya. Selanjutnya kami cocoknya faktur disetor pengusaha dengan faktur yang kami dapatkan di portal," kata Toya.

Sebelumnya Tim Yustisi menyegel galian C di Banjar Nusu, dan Banjar Lebah, Desa Sukadana, kecamatan Kubu, melanggar pasal 34 Perda No 13 tahun 2012.

Sebab, perusahaan itu menggali melebihi kedalaman 15 meter. Sedangkan di lapangan, lahan yang telah tergali, dengan kedalaman sekitar 30 meter. Di samping itu lokasi galian, mendekati pemukiman, jarak bibir jurang dengan pemukiman sekitar 15 meter.

Tercatat di Karangasem, 57 galian C ilegal, 15 galian C berizin. Potensi galian C di Karangasem di tiga kecamatan cukup besar, yakni: Kecamatan Selat (517,6 hektare), Kecamatan Bebandem (1.039,5 hektare), dan Kecamatan Rendang (390,8 hektare). Untuk penambangan: Kecamatan Selat (42 kelompok), Kecamatan Rendang (7 kelompok) dan Kecamatan Bebandem (14 kelompok).

Tetapi di Kecamatan Selat termasuk bukan kawasan galian C, yang masuk kawasan di Kecamatan Bebandem, dan Kecamatan Kubu. **k16**

Edisi : Sabtu, 9 Mei 2015

Hal : 11